



Islam di Kota Ambon pada Masa Kolonial: Perspektif Sejarah

Steve Gerardo Christoffel Gaspersz¹

¹Universitas Kristen Indonesia Maluku. E-mail: sgaspersz@yahoo.com

ARTICLE INFO

Submitted: December 03, 2022

Review: December 14, 2022

Accepted: December 20, 2022

Published: December 24, 2022

KEYWORDS

Post-colonial, social history, religious identity, ethnicity

CORRESPONDENCE

Phone:

E-mail: sgaspersz@yahoo.com

ABSTRACT

The dynamic of development of Islam, either conceptually or institutionally, in Maluku should not be separated from the social history of Maluku society during colonial time of Westerners such as Portuguese and Dutch. This article attempts to reconstruct the dynamic of Islam especially in Ambon Island under colonization of the Dutch (VOC). The highly price of spices around sixteenth and seventeenth centuries had attracted many international traders coming to the spice island for trading spices (clove and nutmeg). Economic transaction and social interaction between local community of Ambon and foreign traders brought about significant social transformations mainly among indigenous people of Ambon, which was a trade center of spice at that time. Such social transformations escalated into political conflict between local community and Western colonizer (Dutch) who forced monopoly system of spice trading. Islam had been adhered by some local communities of Ambon at Leihitu Peninsula far before the Westerners was an important religion that conducted political-economic resistance and negotiated local identity facing colonial administration in Ambon at that time.

ABSTRAK

Dinamika perkembangan Islam, baik secara konseptual maupun institusional, di Maluku tidak dapat dilepaskan dari sejarah sosial masyarakat Maluku, terutama pada masa kolonial oleh bangsa-bangsa Barat seperti Portugis dan Belanda. Artikel ini merupakan upaya merekonstruksi dinamika perkembangan Islam pada masa kolonial di Kepulauan Maluku. Tingginya harga rempah-rempah pada abad-abad ke-16 dan ke-17 telah mengundang banyak pedagang internasional datang ke Maluku yang dikenal sebagai "kepulauan rempah-rempah". Transaksi ekonomi dan interaksi sosial di antara masyarakat lokal dan para pedagang asing mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial yang signifikan dalam kehidupan masyarakat lokal di Maluku, terutama di Ambon sebagai pusat perdagangan. Perubahan-perubahan sosial itu kemudian memuncak menjadi konflik politik antara masyarakat lokal dan para penjajah Barat yang memaksakan sistem monopoli rempah-rempah (cengkih dan pala). Islam yang telah dianut oleh sebagian masyarakat lokal di Jazirah Leihitu Pulau Ambon sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat menjadi salah satu agama penting dalam melakukan resistensi politik-ekonomi dan negosiasi identitas dalam masyarakat kolonial di Ambon saat itu.

Kata kunci: pascakolonial, sejarah sosial, identitas keagamaan, etnisitas

Pendahuluan

Sekitar akhir 1950-an, Frank Cooley, seorang misionaris Presbiterian dan antropolog Amerika, melakukan penelitian disertasinya di Maluku Tengah. Disertasinya pada Universitas Yale (1961) yang bertajuk *Altar and Throne in Central Moluccan Societies: a study of the relationship between the institutions of religion and the institution of local government in a traditional society undergoing rapid social change*, kemudian menjadi salah satu kajian sosiologis agama yang penting tentang Maluku. Studi Cooley berupaya memahami interaksi agama dan kebudayaan lokal (adat) dalam masyarakat Maluku, serta mengelaborasi metamorfosis keagamaan menjadi identitas dialektis orang Ambon-Kristen selama perubahan sosial yang cepat, yang disebutnya sebagai “agama Ambon”.

Tesisnya tentang “agama Ambon” telah memunculkan berbagai wacana kritis mengenai antarmubungan agama dan masyarakat di Maluku. Beberapa sarjana mendukungnya dengan menyatakan bahwa “agama Ambon” Cooley pada gilirannya membantu untuk memahami fenomena Kristianitas dalam konteks partikular masyarakat Maluku. Sementara beberapa sarjana lain mengkritiknya dengan menegaskan bahwa “agama Ambon” yang dikonseptualisasikannya, pada derajat tertentu, merupakan suatu generalisasi saja karena keterbatasan riset lapangan hanya pada pulau-pulau di Maluku Tengah. Dengan demikian, penelitian Cooley sebenarnya tidak mencakup keseluruhan wilayah kepulauan dengan keragaman spektrum budayanya.

Artikel ini akan mempertimbangkan kedua jenis komentar tersebut sebagai sudut pandang kritis untuk memahami peran agama dalam masyarakat. Namun, sekaligus tesis Cooley tentang “agama Ambon” akan digunakan sebagai titik tolak untuk melihat sudut pandang lain tentang agama dan masyarakat, yaitu perspektif sejarah Islam di Ambon. Alasan utama memilih sudut pandang itu adalah karena Cooley melakukan penelitian lapangannya hanya di Maluku Tengah, khususnya desa-desa Kristen.¹ Apa yang telah

dilakukannya tidak cukup untuk mencapai pemahaman tentang “agama Ambon” karena tidak mempertimbangkan Islam di Ambon yang secara historis sudah eksis sebelum kedatangan para pedagang Barat.

Artikel ini merupakan upaya untuk menelusuri kembali dan merekonstruksi eksistensi Islam di Ambon pada masa kolonial, khususnya pada akhir abad ke-16 dan 17. Mempertimbangkan spektrum pengamatannya yang luas, lingkungannya dipersempit pada lintasan sejarah umat Islam di Kota Ambon pada masa perdagangan yang dikendalikan oleh *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) sejak 1605.

Sebagai kota pelabuhan yang penting saat itu, Ambon merupakan suatu wilayah multikultural karena VOC membawa banyak orang yang memiliki identitas etnis dan/atau agama yang berbeda dari berbagai tempat di nusantara sebagai budak ke Ambon. Mereka tidak hanya membawa keterampilan atau tenaga tetapi juga identitas primordial mereka, termasuk gagasan dan praktik keagamaan. Di sisi lain, beberapa komunitas Muslim lokal, terutama dari Jazirah Leihitu (bagian utara Pulau Ambon), selama berabad-abad sebelumnya telah menjalin hubungan dagang dengan para pedagang Muslim dari Ternate dan Tidore (Maluku Utara) dan beberapa tempat di Asia Tenggara. Mereka mengembangkan ajaran Islam yang kontekstual dan mempraktikkan ritual Islam lokal, yang juga bisa ditemui pada kelompok Muslim lain di Ambon. Mereka disatukan oleh kepentingan-kepentingan ekonomi yang sama tetapi juga dipisahkan oleh pemahaman keagamaan tertentu yang saling bertentangan terkait bagaimana umat Islam menghadapi tekanan VOC dan kebijakan-kebijakannya waktu itu.

Sejak Islam diperkenalkan melalui perdagangan rempah-rempah tradisional di kepulauan Maluku – sebelum kedatangan orang Eropa – penduduk asli Maluku telah berjuang untuk mengontekstualisasikan prinsip dasar Islam dalam ranah budaya lokal mereka, dan menemukan tradisi Islam lainnya yang dibawa oleh berbagai kelompok etnis yang datang di Ambon sebagai budak selama masa kolonial.

¹ Frank L. Cooley, *Altar and Throne in Central Moluccan Societies: a study of the relationship between the institutions of religion and the institution of local government in a traditional society undergoing rapid*

social change. (New Haven: Yale University, 1961), 137.

Namun, itu hanya ditujukan kepada komunitas Muslim di kota itu. Pengamatan historis artikel ini dibingkai oleh dua pertanyaan penelitian: [1] Bagaimana eksistensi Islam dalam masyarakat multikultural Ambon selama abad ke-17?; [2] Apa peran umat Islam di Ambon selama abad ke-17?

Kerangka Teoretik

Artikel ini merupakan analisis sejarah tentang komunitas Muslim di Pulau Ambon. Seperti yang ditegaskan oleh beberapa sejarawan bahwa selama berabad-abad Maluku adalah tujuan penting untuk perdagangan rempah-rempah, saya menyadari bahwa tidak dapat dihindari di sini untuk berbicara tentang Maluku dalam konteks luas Asia Tenggara. Atas dasar ini, Anthony Reid memberikan elaborasi historis yang penting dalam karyanya *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680: Expansion and Crisis* (Volume 2). Reid menyajikan elaborasi sejarah yang luas tentang dinamika ranah sosial di Asia Tenggara, serta kompleksitas yang dalamnya orang menemukan interpenetrasi kreatif dari banyak aspek, seperti kepentingan ekonomi, perebutan kekuasaan, kontestasi agama, konstruksi identitas etnis, dan lain sebagainya.² Sejarah dari perspektif Reid bukan tentang deskripsi peristiwa kronologis melainkan proses historis yang melaluinya orang terlibat dalam konteks sosio-kultural mereka dan berbagi ide-ide umum mengenai persamaan dan perbedaan mereka.

Menggunakan analisis sejarah Reid dan beberapa sejarawan lainnya, seperti Richard Leirissa dan Gerrit Knaap, maka di sini pengamatan akan difokuskan pada pemetaan historis suatu komunitas pada periode tertentu untuk mendeteksi perubahan secara bertahap atau radikal. Pemetaan sejarah tersebut kemudian dapat dijadikan fakta sejarah untuk mengonstruksi secara imajinatif suatu aspek yang menentukan (misalnya: agama) yang mempengaruhi kehidupan masyarakat pada masa itu.

Dari perspektif filosofis, M. C. Lemon membagi dua kategori untuk mempelajari sejarah, yaitu sejarah filosofis spekulatif dan

sejarah filosofis analitis. Lemon menegaskan bahwa yang pertama “terdiri dari pemikiran tentang ‘isi’ aktual dari sejarah (manusia) untuk melihat dalam arti apa ‘itu secara keseluruhan’ dapat dijelaskan bermakna”; sedangkan yang kedua “menyelidiki sejarah sebagai disiplin (atau ‘bentuk’) yang menemukan dan memahami masa lalu itu.”³ Penyelidikannya adalah analitik karena secara kritis menganalisis pemikiran di balik cara-cara sejarawan melakukan disiplin mereka.”⁴ Dengan pemahaman seperti itu, orang menyadari bahwa melakukan penelitian tentang sejarah harus diletakkan secara kritis dalam kerangka ilmu sosial yang lebih luas. Artinya, kajian sejarah sebenarnya adalah kajian multidimensi.

Artikulasi Lemon tentang filsafat sejarah akan digunakan secara dialektis untuk membaca beberapa sumber sejarah yang relevan dari pengamatan ini. Apa yang disebut sejarah harus ditempatkan secara kritis sebagai narasi yang direkonstruksi tentang peristiwa tertentu di masa lalu dan secara bersamaan sebagai peta untuk melihat pola sosial tertentu dari satu komunitas di masa lalu. Pola sosial pada dasarnya ditentukan oleh kesadaran sosial kelompok sosial yang terlibat dalam perjuangan mereka untuk mengejar nilai-nilai ideal mereka secara kontekstual (pada masa lalu).

Dengan pertimbangan seperti itu, saya lebih menggunakan sejarah sosial sebagai kerangka artikel ini. Sejarah sosial telah berkembang dalam berbagai model yang mencakup banyak sikap teoretis, praktik metodologis, dan sub-disiplin. Menurut Constantin Iodarchi,⁵

“social history includes the history of social categories and social organization, of work, of towns, of peasants, of the family, of children, of consumption, of poverty, of sex and gender, of medicine, of mentalities, of demography, of crime, of popular culture, etc... The practice of social history encompasses a shift of interest from political events to socioeconomic structures, and a change in historical

² Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680: Expansion and Crisis*, volume 2 (New Haven: Yale University Press, 1995), 132-145.

³ M. C. Lemon, *Philosophy of History: A Guide for Students* (New York: Routledge, 2003), 9.

⁴ Lemon, *Philosophy of History*, 281.

⁵ Constantin Iodarchi, "Sejarah Sosial: Sekolah, Metode dan Studi Kasus," Universitas Eropa Tengah, Budapest 2006, 1.

methods from narrative to quantitative techniques and interdisciplinary models of interpretation."

Perspektif historis tentang peran agama dalam masyarakat diperkaya juga oleh analisis sosiologis yang mencoba menguraikan pengaruh ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana perubahan sosial dalam masyarakat juga berdampak pada urusan agama. Secara sosiologis, ini mengingatkan pada tesis Weber yang terkenal tentang proses rasionalisasi yang didorong oleh etika agama (Calvinisme) yang pada gilirannya menghasilkan semangat kapitalisme di Eropa.⁶ Dalam batas tertentu, tesis Weber mendorong untuk membedakan semangat kemiripan dalam Islam seperti yang ditunjukkan oleh Muslim Ambon vis-à-vis kepentingan ekonomi VOC di Maluku atau Asia Tenggara.

Perjuangan untuk bertahan hidup yang berurusan dengan kepentingan ekonomi, baik oleh Muslim Ambon maupun VOC, pada saat itu dapat dianggap sebagai kontestasi kekuatan untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah. Situasi itu turut dirangsang oleh perspektif agama-agama yang berbeda, yang pada gilirannya mempengaruhi hubungan kekuasaan di antara mereka. VOC menerapkan kebijakan segregasi (*apartheid*) berdasarkan pembagian agama dengan menempatkan orang Ambon-Kristen sebagai pejabat administrasi dalam pemerintahan kolonial dan Ambon-Muslim diberi peran lebih sempit untuk terlibat dalam bisnis kecil perdagangan rempah-rempah. Dampak dari kebijakan tersebut membawa perkembangan sosial lain ketika para pedagang lokal dari luar Maluku, terutama orang Bugis dan Makassar, terlibat dalam bisnis lokal di Kota Ambon, ditambah lagi etnis Tionghoa yang dipercaya oleh Belanda dengan batasan tertentu.

Deskripsi sejarah ini juga dibingkai oleh pendekatan pascakolonial. Artinya, sejarah akan diteliti untuk mendapatkan pemahaman tentang peran agama di Ambon pada abad ke-17 dan membedakan isu-isu krusial yang mencerminkan dinamika interkoneksi berbagai kepentingan dalam masyarakat pada saat itu. Perspektif pascakolonial membantu untuk memahami hegemoni ideologis yang ditemukan

oleh penjajah, terutama dalam hal klasifikasi sosial atau identifikasi agama untuk menaklukkan yang terjajah, bahkan dalam corak pemikiran budaya mereka. Mengenai studi pascakolonial, Bill Ashcroft (dkk) menyatakan,⁷

"Post-colonialism/postcolonialism' is now used in wide and diverse ways to include the study and analysis of European territorial conquest, the various institutions of European colonialism, the discursive operations of empire, the subtleties of subject construction in colonial discourse and the resistance of those subjects, and, most importantly perhaps, the differing responses to such incursions and their contemporary colonial legacies in both pre- and post-independence nations and communities."

Oleh karena itu, sejarah tidak dilihat dan dianggap hanya sebagai catatan bebas nilai tentang peristiwa masa lalu. Sejarah dianggap merupakan produksi dan reproduksi kekuasaan sebagai implikasi dari imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan oleh orang Barat di Nusantara. Melalui lensa analitis tersebut maka orang dapat memperoleh pemahaman tentang dinamika sosial masyarakat kontemporer sebagai arena kontestasi kekuasaan yang sebenarnya melanggengkan dan menopang bentuk imperialisme baru saat ini.

Ambon di Persimpangan Rempah Abad ke-17

Kota Ambon saat ini terkenal sebagai ibukota Provinsi Maluku, Indonesia bagian timur. Kota ini terletak di Pulau Ambon, sebelah selatan Teluk Ambon. Kota ini dapat dicapai dengan penerbangan pesawat selama kurang lebih empat jam dari Jakarta, ibukota Republik Indonesia. Ambon adalah kota bersejarah di Nusantara sejak abad ke-16 yang berlanjut dengan sejarah kolonialisme oleh orang Eropa. Bagian ini akan menguraikan pembentukan kota Ambon sebagai kota pelabuhan sejak pemerintahan Portugis dan Belanda.

Ambon berasal dari pemukiman di sekitar luar benteng Portugis yang didirikan pada tahun 1576. Portugis membutuhkan benteng baru setelah dihalau oleh Sutan Baabullah dari Ternate (Maluku Utara) pada tahun 1575. *Casados*, mantan tentara Portugis yang menikah dengan wanita Asia dan memilih untuk tinggal

⁶ Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (London 1930).

⁷ Bill Ashcroft et al, *Key Concepts in Post-Colonial Studies* (New York: Routledge, 1999), 187.

di Asia, tinggal di sekitar benteng itu. Selama periode krisis, mereka difungsikan sebagai milisi untuk mendukung garnisun Portugis melawan para penentangannya.⁸

Selain itu, beberapa desa Kristen Ambon yang mendukung Portugis tinggal di dekat benteng untuk mendapatkan perlindungan dari serangan koalisi Muslim anti-Portugis yang dipimpin oleh orang-orang Ternate. Salah satu desa ini terdiri dari orang merdeka, Kristen Asia, yang mengikuti Portugis dari Maluku Utara ke Ambon pada tahun 1575. Orang merdeka ini adalah komunitas asli Maluku Utara tetapi bisa jadi adalah bekas budak yang memperoleh kebebasan dari tuannya.

Portugis mengalami sejumlah serangan serius pada 1591, 1593, dan 1598 dari lawan-lawannya, terutama komunitas-komunitas Ambon-Muslim yang didukung oleh pasukan Ternate dan/atau Jawa. Pada 1600, kapal-kapal Belanda di bawah komando Steven van der Haghen membantu kaum Muslim melawan Portugis. Steven van der Haghen kembali atas nama *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) pada 23 Februari 1605, disertai armada sepuluh kapal. Tidak lama kemudian, Gubernur Gaspar de Melo menyerahkan benteng dan seluruh wilayah kekuasaannya di Maluku Tengah kepada Belanda. Ini untuk pertama kalinya Belanda memperoleh hak berdaulat di Asia yang menandai dimulainya imperium kolonial mereka.⁹

Steven van der Haghen memaksa gubernur dan para pejabatnya, tentara dan keluarga mereka untuk berlayar dengan dua kapal ke Melaka. Waktu berikutnya, sekitar 250 orang Portugis, termasuk misionaris Yesuit dan beberapa orang merdeka dikirim ke Filipina. Hanya 46 keluarga *mestizo* (orang Asia blasteran Portugis) yang memutuskan untuk tinggal di Ambon dan menyatakan kesetiaan kepada Belanda bersama sekitar 200-300 orang lainnya.

Terkait berbagai model pengembangan kota-kota di Asia Tenggara, Belanda mengembangkan Ambon sebagai replikasi kota-

kota di Belanda.¹⁰ Knaap mencatat bahwa ibukota kolonial Asia Tenggara pada abad ke-16 dan 17, seperti Melaka, Manila dan Batavia, dibangun menyerupai kota-kota Eropa pra-industri yang dicirikan sebagai pemukiman yang:¹¹ (1) agak padat dan tertutup tembok atau parit untuk pertahanannya; (2) memiliki populasi non-agraris yang mendominasi pedesaan sekitarnya; (3) memiliki populasi dengan status hukum yang berbeda dengan penduduk pedesaan; (4) entitas politik dengan lembaga pemerintahan sendiri dengan otonomi yang cukup tinggi vis-à-vis penguasa kerajaan.

Knaap menegaskan bahwa pengembangan kota Ambon cocok dengan pola Eropa ini, kecuali untuk karakteristik spasial. Terletak sebagai tempat yang agak ramai di lembah pantai di muara Sungai Waigajah dan Waitomo, kota ini tidak memiliki dinding atau parit yang mengelilinginya. Unsur non-agrikultural dominan secara ekonomi di pemukiman penduduk, khususnya dalam hubungan perdagangan di sekitar pedesaan. Penduduknya memiliki status peradilan khusus daripada penduduk desa yang terdiri dari pelayan VOC dan penjajah atau *burger* (warga negara). Warga negara diwajibkan untuk melayani negara (VOC) dengan membentuk milisi bersenjata yang membantu tentara VOC selama fase darurat. Di sisi lain, penduduk desa harus melayani negara kolonial dengan pekerjaan wajib seperti menjadi pelayan, mengantar surat, dan mempersiapkan perbekalan, mengelola armada *hong*i (kapal perang pribumi), dan membantu membangun benteng. Secara administratif, Ambon tidak memiliki pemerintahan otonom tetapi dipimpin oleh gubernur dan dewan VOC setempat.

Etnisitas dan Agama-agama dalam Masyarakat Ambon

Ada empat bangunan di Ambon yang digunakan untuk urusan keagamaan Kristen di sekitar kastil ketika diambil-alih oleh Belanda dari Portugis. Dua gereja untuk komunitas desa Ambon; sedangkan dua lainnya adalah St. Paul

⁸ Gerrit J. Knaap, "A City of Migrants: Kota Ambon at the End of the Seventeenth Century". *INDONESIA* No. 51 (Apr. 1991), 105.

⁹ Knaap, "A City of Migrants", 106.

¹⁰ Anthony Reid, "The Structure of Cities in Southeast Asia, Fifteenth to Seventeenth Centuries." *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 11, No. 2 (Sep., 1980), pp. 235-250.

¹¹ Knaap, "A City of Migrants", 106-107.

sebagai gereja paroki dan Misericordia sebagai rumah sakit untuk melayani garnisun Portugis dan penduduk perkotaan. Pada 1625-1630 Belanda membangun kembali gedung baru untuk Misericordia dengan tujuan yang sama seperti rumah sakit dan St. Paul diubah menjadi gereja Calvinis Protestan untuk kebaktian dan khotbah bagi jemaat berbahasa Belanda dan Melayu.¹²

Pada akhir 1620-an, gedung St. Paul runtuh setelah dihantam badai. Pemerintah kemudian membangun gedung batu baru untuk melayani jemaat di situsnya, serta satu gereja kecil di dalam benteng untuk melayani garnisun. Namun, Belanda menerapkan pemisahan mendasar antara jemaat berbahasa Belanda dan Melayu setelah api besar membakar gereja kota pada 1658. VOC memutuskan bahwa jemaat harus memiliki setiap tempat ibadah. Jemaat berbahasa Belanda beribadah di gereja kecil di dalam benteng, sedangkan yang berbahasa Melayu di gereja kecil kayu yang dibangun di lokasi bangunan tua yang terbakar.

Pemerintah mendirikan area kota yang dikelilingi oleh pagar kayu temporer setelah dua kali (1616 dan 1636) diancam oleh orang-orang Kristen Ambon dari pedalaman yang bangkit melawan VOC dan pada 1665 ketika beredar desas-desus tentang serangan Makassar di Ambon. Pada 1680-an, Gubernur Padtbrugge membuat parit dengan mewajibkan kerja paksa besar-besaran penduduk Ambon. Hal ini memicu ketidakpuasan secara besar-besaran dari penduduk Ambon yang mengakibatkan Padtbrugge dipanggil kembali ke Batavia oleh Pemerintah Pusat pada 1687.

Sektor terbesar di VOC adalah militer dan angkatan laut, tetapi sektor perdagangan jelas yang paling kuat. Sektor perdagangan yang menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan umum dan perdagangan. Penduduk kota atau *burger* dibagi secara

vertikal menjadi tiga bagian:¹³ (1) orang Eropa – mereka yang menikahi perempuan Asia dan melahirkan keturunan *mestizo*; (2) Tionghoa – mereka yang bermigrasi ke Ambon dengan kebijakan VOC untuk mempekerjakan mereka di ibukota kolonial. Karena kurangnya perempuan Tionghoa, beberapa laki-laki Tionghoa mengawini bekas budak perempuan Makassar dan Bali; (3) *burgerij* pribumi – warga kota yang terdiri dari kelompok etnis Ambon. Istilah “pribumi” pada zaman VOC digunakan sebagai label untuk orang Asia pada umumnya. Pada abad ke-17 dan 18 warga pribumi terdiri dari orang Asia non-Ambon. Selama abad ke-17 bagian ini diperkuat oleh *mestizos* dan migran dari bagian lain Asia. Misalnya, pada 1656 jumlah yang lebih besar adalah bekas tawanan perang Makassar dan mengalami peningkatan jumlah dengan masuknya budak yang dibebaskan (asal Makassar, Buton, Bugis, dan Bali).¹⁴

Dari struktur ekonomi, Ambon adalah saluran di mana semua kegiatan impor dan ekspor dilakukan setelah VOC menahan perlawanan terakhir orang Ambon terhadap peraturannya pada 1650-an. Semua keputusan penting yang berkaitan dengan ekspor cengkih yang penting dari Ambon ditangani oleh VOC. Perusahaan ini menerapkan monopoli perdagangan cengkeh pada 1640-an. Orang Ambon-Kristen hanya memiliki ruang ekonomi yang terbatas karena mereka tetap berada di wilayah-wilayah yang sangat berorientasi subsisten. Sedangkan orang Ambon-Muslim dibatasi untuk memajukan jaringan perdagangan mereka dengan pedagang-pedagang luar. VOC juga menerapkan kebijakan jalur perdagangan dan pelayaran swasta untuk melindungi sepenuhnya monopoli perdagangan mereka.

Segmen penduduk yang lebih besar masih berorientasi pada pertanian di sektor swasta ekonomi perkotaan. Hanya orang Tionghoa dan Makassar yang membudidayakan secara khusus beberapa tanaman pangan

¹² Anthony Reid, “Understanding Melayu (Malay) as a Source of Diverse Modern Identities.” *Journal of Southeast Asian Studies*, 32 (3), October 2001: 305-306. Reid mencatat bahwa di kawasan barat Nusantara, “Masuk Melayu” berarti menjadi Muslim, sedangkan di kawasan timur Nusantara frase itu berarti menjadi Kristen.

¹³ Steve G. C. Gaspersz, “Church History in Maluku: Possibilities toward Social History Dimensions” in Huub Lems (ed.), *Mission History and Mission Archives*. Stichting de Zending der Protestantse Kerk in Nederland, Utrecht 2011: 100-107.

¹⁴ Knaap, “A City of Migrants”, 112.

berskala kecil. Warga kota Eropa yang kaya memiliki banyak sapi untuk menghasilkan susu dan mentega yang dipasarkan. Mereka yang tergabung dalam komunitas Eropa-*mestizo* dan *Mardijker*-Makassar bekerja sebagai pemburu, nelayan, penyadap sopi, dan pemotong kayu bakar. Beberapa kelompok Eropa-*mestizo* menjalankan usaha kedai. Ada juga sejumlah orang Tionghoa dan *Mardijker*-Makassar yang menjadi pedagang pasar.

Kapal-kapal VOC berfungsi untuk menghubungkan wilayah-wilayah Batavia, Ternate, Banda, dan Makassar; juga secara khusus digunakan untuk mengangkut pasukan, amunisi, dan berbagai peralatan dan barang-barang impor, seperti tekstil Sulawesi, beras dari Jawa dan Makassar, orang Tionghoa dari Batavia; juga budak Bali, Makassar, Bugis, dan Buton yang dibeli di Batavia atau Makassar. Pemerintah secara bertahap mengimpor budak karena takut mereka menjadi berbahaya, terutama orang Bali dan Makassar.¹⁵

Agama adalah isu yang krusial karena sulit untuk mendapatkan hubungan yang sehat antara para tuan Belanda-Protestan- dan rakyat yang beragama Islam. Selama perang pendudukan antara 1624 dan 1658, kaum Muslim memberi perlawanan sengit terhadap Belanda. Demi kebijakan kolonial, VOC melakukan sensus untuk mendaftarkan orang Ambon berdasarkan identitas agama mereka: Kristen, Muslim, dan penganut agama pribumi lama di Maluku Tengah.¹⁶ Identifikasi berbasis agama di antara penduduk kota terjadi sesuai dengan perubahan komposisi penduduk. Hal itu telah meningkat dan menurun terutama disebabkan oleh kebijakan VOC. Untuk menggerakkan kegiatan ekonomi perkotaan, VOC mendatangkan banyak budak dari Bali dan Makassar.

Terdapat beberapa komunitas Muslim di Ambon, seperti di Batumerah. Mereka awalnya adalah penduduk Hoamoal (Pulau Seram) dan Pulau Kelang yang pindah ke Ambon karena kebijakan *hongi tochten* oleh Belanda. Jauh sebelum kedatangan orang Eropa, mereka sudah melakukan kontak dagang dengan pedagang-pedagang Jawa dan Makassar. Kerajaan Hitu (bagian utara Teluk Ambon) telah menjadi pelabuhan sementara perdagangan rempah-rempah antara penduduk setempat dan para pedagang Muslim dari bagian lain Asia Tenggara, terutama Jawa.¹⁷ Sejak saat itu, Batumerah menjadi salah satu kampung Muslim terbesar di Kota Ambon.

Jaringan niaga para pedagang Makassar dan penduduk lokal di Maluku memiliki pengaruh yang sangat besar terutama terhadap penyebaran ajaran Islam secara langsung dan tidak langsung.¹⁸ Penyebaran Islam di Kota Ambon juga dilakukan oleh para budak dari daerah lain (Makassar, Bugis, Buton). Mereka mengubah komposisi Muslim di kota ini secara signifikan meskipun VOC membatasi peran dan kegiatan ekonomi mereka.

Berdasarkan kepentingan ekonomi dan afiliasi agama, kelompok migran yang kemudian menjadi penduduk perkotaan, secara intensif berinteraksi dengan komunitas Muslim lokal di kota dan beberapa daerah di Maluku Tengah. Meskipun mereka memiliki identitas agama yang sama sebagai Muslim tetapi jelas mereka dibedakan karena tradisi Islam yang khas yang ditandai dengan perspektif kosmopolitan, di satu sisi, dan perspektif tradisional, di sisi lain. Perbedaan di antara umat Islam (orang luar dan orang dalam) juga dipertajam oleh persaingan ekonomi.

Komunitas Muslim lokal di wilayah Hitu menerima pengaruh Islam yang kuat dari Ternate dan Tidore, dua kerajaan yang saling bersaing di bidang ekonomi untuk memperluas kekuasaan politik mereka ke Maluku Tengah.

¹⁵ Gerrit Knaap, "The Demography of Ambon in the Seventeenth Century: Evidence from Colonial Proto-Censuses." *Journal of Southeast Asian Studies* 26, 2 (September 1995): 233. Knaap mencatat bahwa proporsi para budak dari penduduk non-pribumi lebih dari 50 persen, sementara penduduk pribumi sekitar 11-13 persen..

¹⁶ Knaap, "The Demography of Ambon," 230.

¹⁷ Imam Rijali, *Hikajat Tanah Hitu* (no date and publisher).

¹⁸ Richard Z. Leirissa, "The Bugis-Makassarese in the port towns: Ambon and Ternate through the nineteenth century." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 156, No. 3, Authority and Enterprise Among the Peoples of South Sulawesi (2000), 621.

Mereka percaya bahwa Islam tidak hanya dipahami sebagai agama atau spiritualitas semata tetapi, lebih jauh, sebagai senjata ideologis untuk membangun kekuatan politik dan ekonomi mereka, serta melawan dominasi kolonial (Portugis dan Belanda) yang dipandang telah merusak jejaring ekonomi tradisional mereka. Sementara itu, didorong oleh kebijakan VOC yang terpisah, kelompok migran Muslim lebih fokus membangun kantong ekonomi penduduk perkotaan di Ambon. Jika, di satu sisi, banyak kebijakan VOC telah melemahkan dan meminggirkan komunitas Muslim lokal, maka di sisi lain, kebijakan semacam itu justru memperkuat keberadaan kelompok-kelompok Muslim migran sosial-ekonomi dengan jaringan perdagangan mereka. Hal itu kerap memicu ketegangan antara Muslim lokal dan Muslim migran di pasar Kota Ambon.

Secara kultural, kedua kelompok Muslim tersebut menunjukkan karakteristik yang berbeda. Komunitas Muslim lokal memeluk Islam secara tradisional dengan menggabungkan ajaran dan ritual Islam dengan adat, yang disebut "Islam Maluku" atau *Salam*. Ini bertolak belakang dengan Islam yang dipraktikkan oleh kelompok Muslim migran di beberapa klaster perkotaan yang bernuansa kosmopolitanisme. Islam adalah salah satu penanda identitas yang menonjol ketika mereka mendiami wilayah di luar tempat asalnya. Sebaliknya, banyak perempuan Makassar menikah dengan laki-laki Tionghoa yang pada gilirannya menjadi komunitas multikultural di kota sehingga tidak jelas lagi garis penanda identitas yang berbeda dan secara signifikan membentuk identitas sosial yang hibrid.

Menurut Leirissa, kelompok Bugis-Makassar yang merdeka (non-budak) di Ambon telah dianggap sebagai *burger Moorsche* sejak zaman VOC. Namun demikian, Bugis-Makassar tidak pernah terlalu penting dalam organisasi ini.¹⁹ Bugis-Makassar di Ambon termasuk dalam unit-unit kecil dalam perusahaan *burgerij Moorsche*. Anggota perusahaan ini sebagian besar adalah Muslim Tionghoa keturunan campuran dan dari kelompok inilah para perwiranya juga dipilih.

Monopoli dagang rempah-rempah, khususnya cengkeh, oleh VOC di Maluku Tengah sebenarnya adalah penindasan ekonomi terhadap Muslim lokal dan Muslim migran. Tetapi penindasan semacam itu bagi kedua kelompok Muslim itu akhirnya menimbulkan rasa perbedaan identitas etnis di antara kedua kelompok Muslim tersebut. Kebijakan segregasi atas dasar pembagian kerja (profesionalisme) oleh VOC secara tidak langsung membentuk pemahaman diri baru tentang identitas yang melekat pada Islam sebagai agama. Sejumlah pemberontakan lokal skala kecil kelompok-kelompok Makassar kemudian dituduh oleh VOC sebagai gerakan pemberontakan Islam melawan Kompeni di Ambon.

Itu terjadi juga dengan afiliasi politik orang-orang Leitimor di bagian selatan Teluk Ambon, yang sebagian besar menganut Protestanisme, dengan Portugis atau Belanda untuk melawan kelompok Muslim Leihitu. Perselisihan antara dua kelompok sosial Ambon ini pada gilirannya menimbulkan pelabelan sebagai ketegangan agama. Label agama meningkat secara intensif ketika Belanda mempekerjakan orang-orang Leitimor sebagai pasukan Kompeni untuk menyerang Hoamoal dan Hitu selama ekspedisi *hongt ochten*.²⁰ Istilah *Salam-Sarane* atau Muslim-Kristen sejak awal adalah penggambaran dialektika identitas antara Leihitu (Muslim) dan Leitimor (Kristen). Pada saat itu ketegangan klasik budaya didamaikan melalui mekanisme budaya yang disebut *Pela*.²¹ Melalui *pela* sebagai institusi budaya di antara kelompok-kelompok sosial Ambon (Muslim dan Kristen), istilah *Salam-Sarane* diabadikan sebagai pemahaman budaya tentang dialektika identitas agama orang Ambon.

Perspektif Islam yang Dialektis di Ambon

²⁰ Gerrit Knaap, "Headhunting, Carnage and Armed Peace in Amboina, 1500-1700." *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol. 46, No. 2, Aspects of Warfare in Premodern Southeast Asia (2003), 168.

²¹ Dieter Bartels, *Guarding The Invisible Mountain: intervillage alliances, religious syncretism and ethnic identity among Ambonese Christians and Moslems in the Moluccas*. Ithaca: Cornell University 1978.

¹⁹ Leirissa, "The Bugis-Makassarese in the port towns," 249.

Kota Ambon pada abad ke-17 adalah arena kontestasi identitas dan kekuasaan. Sebagai kota pelabuhan Belanda yang strategis, Ambon berfungsi sebagai penghubung untuk menghubungkan berbagai jaringan perdagangan dari banyak wilayah. Kota ini juga telah menjadi pusat perjumpaan lintas budaya berbagai kelompok etnis di Nusantara, serta di Asia Tenggara. Berbagai kelompok etnis tersebut membawa serta tradisi keagamaannya ke kepulauan rempah-rempah (Maluku).

Islam diintroduksi oleh para pedagang Muslim Persia, India, dan Jawa jauh sebelum kedatangan orang Eropa. Empat kerajaan di Maluku Utara pernah terkenal sebagai kesultanan terbesar di Nusantara. Ternate dan Tidore terutama adalah dua kesultanan yang kemudian menjadi benteng bagi kaum Muslim melawan agresi Eropa di Maluku. Kedua kerajaan ini memperluas kekuasaannya ke Maluku Tengah bersama rekan-rekan mereka di Hoamoal (Pulau Seram) dan Hitu (Pulau Ambon). Kemudian, orang-orang Eropa (Portugis dan Belanda) memperkenalkan Kristianitas – Katolik dan Calvinisme Protestan – kepada penduduk asli Maluku di Halmahera (Maluku Utara) dan Maluku Tengah (berbasis di Ambon).

Sejak kedatangan Portugis, komunitas Ambon-Muslim telah memainkan peran penting dalam urusan ekonomi dan agama. Muslim Hitu telah memiliki jaringan perdagangan dan militer yang solid dengan kesultanan Islam Ternate/Tidore dan kerajaan Jawa juga. Portugis sebenarnya tidak memiliki posisi yang stabil di Ambon menghadapi perlawanan kelompok Muslim dari Jazirah Leihitu. Portugis membentuk afiliasi dengan komunitas Leitimor yang sebagian besar konversi menjadi Katolik sebagai strategi melawan Leihitu.²² VOC yang datang untuk mendukung tentara Muslim melawan Portugis kemudian berhasil menyingkirkan kekuasaan Portugis di Ambon dan Maluku Tengah. Protestanisme dengan

demikian menggantikan Katolik sebagai agama kolonial resmi pada waktu itu.

Pertemuan berbagai kelompok etnis, yang sebagian besar dibawa oleh Belanda dari Batavia (Jawa), Bali, dan Makassar untuk menggerakkan sistem ekonomi perkotaan di Ambon, telah menciptakan kota ini sebagai “kota kaum migran” yang sibuk pada abad ke-17. Meskipun Protestan adalah agama penguasa Belanda pada saat itu, tetapi keberadaan budak terutama dari Makassar meningkatkan jumlah Muslim secara signifikan di Kota Ambon. Di tingkat menengah, beberapa kelompok migran dari Arab dan Tionghoa memiliki peran penting dalam mengelola pasar dan perdagangan domestik. Pedagang Tionghoa (kebanyakan laki-laki) yang dibawa VOC ke Ambon mengawini perempuan-perempuan budak Bali dan Makassar sehingga membentuk kelompok etnis campuran yang mendominasi banyak sektor ekonomi Kota Ambon.

Selain itu, kelompok Muslim perkotaan di Ambon berinteraksi di pasar dengan kelompok-kelompok Muslim lokal dari Hitu, Saparua, Haruku, dan Pulau Seram. Interaksi di antara mereka tidak selalu dalam kinerja yang harmonis. Salah satu penyebab ketegangan adalah pada pemahaman tentang ajaran dan praktik Islam. Muslim pribumi menerima Islam melalui kegiatan perdagangan. Islam bagi mereka dianggap sebagai bagian dari proses budaya melalui, misalnya, perkawinan campur antara pedagang Muslim (orang luar) dengan perempuan lokal. Kepatuhan mereka pada Islam berlangsung melalui interpenetrasi ajaran Islam dan budaya lokal. Proses ini pada gilirannya menciptakan bentuk-bentuk kontekstual pengajaran dan praktik keagamaan Islam. Sementara itu, kelompok Muslim perkotaan memasuki Kota Ambon tanpa banyak berhubungan dengan unsur-unsur kebudayaan lokal. Mereka mampu mengawetkan religiositas “murni” Islam karena menetap di kantong-kantong migran, yang memungkinkan mereka dapat melestarikan identitas etnis dan agama secara eksklusif.

Pembagian wilayah ekonomi Belanda di Kota Ambon berdasarkan profesionalisme dan identitas etnis secara bertahap membentuk

²² Terdapat sekitar 10 desa yang berkonversi menjadi Katolik pada masa penguasaan Portugis di Ambon, yang selanjutnya berkonversi lagi menjadi Protestan pada masa penguasaan Belanda. Akan tetapi, sebagian besar mereka masih tetap memelihara warisan Portugis seperti yang dapat dilihat sampai sekarang pada nama-nama marga: De Fretes, Alfons, Muskitta.

kristalisasi Islam di ruang publik Ambon.²³ Protestanisme tidak memiliki pengaruh yang menonjol secara keagamaan karena dianut oleh segelintir saja elit Belanda yang tinggal di benteng, serta oleh jemaat Kristen lokal yang tinggal di pedesaan. Kelompok Muslim perkotaan sebagian besar mendominasi sektor ekonomi domestik di Kota Ambon, khususnya di kawasan pelabuhan, karena didukung oleh VOC. Di sisi lain, Muslim lokal mengalami lebih banyak tekanan dari VOC karena mereka diduga cenderung berafiliasi dengan para pedagang Ternate/Tidore dan Jawa, serta membuat “pasar gelap” perdagangan rempah-rempah. Atas dasar kecurigaan tersebut, VOC menerapkan kebijakan *hong-tochten* untuk menghancurkan sindikat perdagangan rempah-rempah oleh orang Ambon-Islam terhadap monopoli VOC.

Ketegangan dan konflik antara Muslim pribumi dan Muslim perkotaan sering terjadi di pasar untuk memperjuangkan ruang ekonomi. Yang pertama selalu dalam posisi marjinal dan yang terakhir sebagian besar mendominasi pasar Kota Ambon. Oleh karena itu, Islam di Kota Ambon selama abad ke-17 lebih menggambarkan wajah Islam perkotaan yang dikhususkan kepada kaum Muslim migran dari Arab, Jawa (Batavia), dan Makassar. Tradisi Islam “murni” secara mencolok dikembangkan di Kota Ambon daripada Islam sinkretis-tradisionalis yang dipraktikkan oleh komunitas Muslim pribumi. Dengan perkataan lain, Islam di Ambon menampilkan wajah pluralistik dan tidak menyandang interpretasi tunggal tentang ajaran Islam pada masa kolonialisme Belanda. Tensi kedua kelompok Muslim itu juga berdampak pada relasi Muslim-Kristen di Kota Ambon. Kaum Muslim perkotaan cenderung membentuk aliansi ekonomi timbal-balik dengan VOC; VOC tidak banyak mengintervensi urusan agama selama tidak mengganggu urusan ekonominya. Sebaliknya, komunitas Muslim pribumi dipengaruhi oleh

kesetiaan politik kepada Ternate/Tidore karena melawan monopoli perdagangan cengkeh VOC.

Kesimpulan

Keberadaan Islam di Kota Ambon pada abad ke-17 dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan politik VOC. Masuknya berbagai kelompok etnis ke Kota Ambon sebagai bagian dari kebijakan ekonomi VOC untuk menggerakkan aktivitas ekonomi kolonial telah menciptakan kelompok sosial perkotaan sekaligus memperluas Islam urban yang khas. Namun, di sisi lain, Islam yang sebelumnya dianut oleh Muslim pribumi lebih banyak menampilkan wajah Islam hibridik yang dikontekstualisasikan. Jika Muslim perkotaan cenderung mempraktikkan Islam puritan sejak dianut oleh kelompok etnis migran secara eksklusif, maka Muslim Ambon pribumi cenderung mengontekstualisasikan ajaran Islam sebagai bagian dari proses kebudayaan yang inklusif, terutama melalui proses saling kawin-mawin antara “orang luar” (pedagang asing/laki-laki) dan “orang dalam” (perempuan pribumi).

Perbedaan Muslim perkotaan dan Muslim pribumi (desa) juga tampak dalam tanggapan mereka terhadap Kristianitas yang diintroduksi oleh Portugis dan Belanda. Muslim perkotaan tidak banyak mengintervensi urusan politik kolonial dan sebagian besar berfokus pada sektor ekonomi masyarakat perkotaan di Ambon. Sebaliknya, Muslim Ambon pribumi menganggap Kristianitas sebagai bagian dari strategi politik kolonial untuk mengurangi kebudayaan Ambon dan menghapus sistem jaringan ekonomi lokal yang berdiri selama berabad-abad dengan pusat-pusat urusan ekonomi di Maluku Utara dan Asia Tenggara.

REFERENSI

- Ashcroft, Bill (et al), *Key Concepts in Post-Colonial Studies*. Routledge, New York, 1999.
- Bartels, Dieter, *Guarding the Invisible Mountain: Intervillage Alliances, Religious Syncretism and Ethnic Identity among Ambonese Christians and Moslems in the Moluccas*. Cornell University, Ithaca, 1977.
- Chauvel, Richard, *Nationalists, Soldiers and*

²³ Orang-orang Ambon-Kristen sebagian besar menduduki jabatan administrasi pemerintahan; orang Arab dan orang Tionghoa diberikan ruang untuk mengelola perdagangan domestik di Ambon dan Maluku Tengah; orang-orang Bali, Buton, dan Makassar dipekerjakan sebagai budak-budak di pelabuhan atau mendapat pekerjaan rendahan.

- Separatists: The Ambonese Islands from Colonialism to Revolt 1880-1950*. KITLV Leiden, 1990.
- Cooley, Frank, *Altar and Throne in Central Moluccan Societies: a study of the relationship between the institutions of religion and the institution of local government in a traditional society undergoing rapid social change*. Yale University, New Haven, 1961.
- Gaspersz, Steve G. C., "Church History in Maluku: Possibilities toward Social History Dimensions" in Huub Lems (ed.), *Mission History and Mission Archives*. Stichting de Zending der Protestantse Kerk in Nederland, Utrecht, 2011.
- Hutchinson, John & Smith, Anthony (eds.), *Ethnicity*. Oxford University Press, Oxford, 1996.
- Imam Rijali, *Hikajat Tanah Hitu*, no date and publisher.
- Iodarchi, Constantin, "Social History: Schools, Methods and Case Studies," Central European University, Budapest, 2006.
- Keuning, J., *Ambonezen, Portugezen en Nederlanders: Ambons geschiedenis tot het einde van de zeventiende eeuw*, translated into Indonesian by S. Gunawan, *Sejarah Ambon Sampai Pada Akhir Abad ke-17*. Bhratara, Jakarta, 1973.
- Knaap, Gerrit, "A City of Migrants: Kota Ambon at the End of the Seventeenth Century," *INDONESIA* No. 51 (Apr. 1991).
- _____, "The Demography of Ambon in the Seventeenth Century: Evidence from Colonial Proto-Censuses," *Journal of Southeast Asian Studies* 26, 2 (September 1995).
- _____, "Headhunting, Carnage and Armed Peace in Amboina, 1500-1700," *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol. 46, No. 2, Aspects of Warfare in Premodern Southeast Asia (2003).
- Leirissa, Richard Z., "The Bugis-Makassarese in the port towns: Ambon and Ternate through the nineteenth century," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 156, No. 3, Authority and Enterprise Among the Peoples of South Sulawesi (2000).
- Lemon, M.C., *Philosophy of History: A Guide for Students*. Routledge, New York, 2003.
- Miller, George, *Indonesia Timur Tempo Doeloe 1544-1992*. Komunitas Bambu, Jakarta, 2011.
- Prentiss, Craig (eds.), *Religion and the Creation of Race and Ethnicity: an introduction*. New York University Press, New York 2003.
- Reid, Anthony, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680: Expansion and Crisis*, volume 2. Yale University Press, New Haven, 1995.
- _____, "The Structure of Cities in Southeast Asia, Fifteenth to Seventeenth Centuries," *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 11, No. 2 (Sep., 1980), pp. 235-250.
- _____, "Understanding Melayu (Malay) as a Source of Diverse Modern Identities," *Journal of Southeast Asian Studies*, 32 (3), October 2001.
- Ricklefs, M. C., *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. Stanford University Press, Stanford, 2002.
- Turner, Jack, *Sejarah Rempah: dari erotisme hingga imperialism*. Komunitas Bambu, Jakarta, 2011.